

A. Buku

- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika Jakarta, 2009.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta: 2009 Cet-4.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 Cet-4.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Andri Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*, Segap Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008.
- C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Iinternasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, diterjemahkan oleh Amanullah, UI, Jakarta, 1988.
- Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.

- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002.
- H.M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Alumni, Bandung, 2011.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, PT. Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2008.
- Josep Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, cetakan pertama, Setara Press, Jatim, 2019.
- Kartiwa, A dan Nugraha, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Lepsindo, Bandung, 2012.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Khoirul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Muhamad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru, 2006.

- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara, Center For Law and Good Government* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Sarman, Muhammaad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Siregar, *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Sekolah Tinggi Umu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2015.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

B. Jurnal/Makalah

- Andri Yanto dkk., *Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No. 2, 2023.
- Dhils Noviades, *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol 4, No. 1, 2013.
- Edward H, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, 2016, Vol XLII No. 1.
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2013, *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 17, No 1.
- Fatkhul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah- Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta, *Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah*, *E- Jurnal Manajemen Universitas Udayana* Vol. 9 No. 4, 2020.
- Ika Agustina, *Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022.
- M Junaidi, *Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Muhammad Aziz Zaelani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, dan Isharyanto Isharyanto, *Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 26, No. 3, 2019.
- NugrohoWahyu, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 3.
- Oman Sukmana, *“Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”*, *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1, 2016.
- Saeful Fachri, Indra Sulistiana, dan Muhammad Saefi Mubarak, *Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada*

Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 21 No. 02, 2021.

Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Disertasi Universitas Indonesia, 2002.

Dadang Solihin, *Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index*, Final Workshop CGI, Jakarta, 2008.

Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137

PMK Nomor 6 Tahun 2012 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah

D. Website/ Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 02 November 2023, pukul 17.31 Wib.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200623/9/1256557/ridwan-kamil-protes-ke-pemerintah-pembagian-dana-transfer-daerah-tidak-adil->

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/melihat-lagi-deretan-protes-bupati-kepulauan-meranti-soal-dana-bagi-hasil-minyak-yang-berujung-teguran-kemendagri>

<https://www.kaltimprov.go.id/berita/pusat-harus-adil-berikan-dana-perimbangan>

www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php Diakses pada tanggal 11 Maret 2024